

## PERPADUAN SERASI, PENGGAGAS INOVASI

Fatin Nuha Astini, Soesilo Zauhar, Farida Nurani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: fatinnuha@yahoo.com

**Abstract:** *Harmonious Coherence, Initiators of Innovation.* This study start from two assumption. First, innovation need an initiator as a pionerr, innovator, secondly, in the governance there should be a combination of stakeholders. Innovative governance needed to answer an increasingly diverse public issues varied, to create it, isn't easy, it requires a combination of initiator and stakeholders. This study used a qualitative approach and data analysis spradley models. The result, two assumptions are manifested in Innovative Governance through Malnutrition Poverty Movement (GENTASIBU), an innovative program initiated Nganjuk regent wife, came from the response of the high rates of malnutrition, then, innovator raises an idea that as a solution, its shaped GENTASIBU. Not only raises, but also the innovator consistent fight for her idea, until formally approved by regents decision letter, 188/140/K/411 013/2009. The success of this innovation can not be separated from the harmonious cooperation among stakeholders, and in some other places, the two arguments are not fulfilled.

**Keyword:** *innovative governance, coherence of stakeholder's, initiators of innovation*

**Abstrak:** *Perpaduan Serasi, Penggagas Inovasi.* Penelitian ini berawal dari dua asumsi. Pertama, bahwa inovasi membutuhkan seorang inisiator sebagai pelopor, pengagas inovasi, kedua, di dalam *governance* harus ada perpaduan *stakeholders*. *Innovative governance* diperlukan guna menjawab beragam permasalahan publik yang kian variatif, untuk menciptakanya bukanlah hal mudah, maka diperlukan seorang inisiator dan perpaduan *stakeholders*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data model spradley. Hasilnya, dua asumsi tersebut telah diwujudkan dalam gerakan pengentasan gizi buruk (GENTASIBU), sebuah program inovatif yang digagas istri bupati Kabupaten Nganjuk, berawal dari daya tanggapnya terhadap tingginya angka gizi buruk, selanjutnya penggagas memunculkan suatu gagasan sebagai penyelesai, yaitu berbentuk suatu gerakan pengentasan gizi buruk. Tidak hanya memunculkan namun penggagas juga konsisten mengembangkan gagasan, memperjuangkan hingga disahkan secara resmi melalui Surat Keputusan Bupati No. 188/140/K/411.013/2009. Keberhasilan inovasi ini juga tidak terlepas dari hasil kerjasama yang serasi antar *stakeholders*, dan di beberapa tempat lain, dua argumen tersebut belum tentu dapat terpenuhi.

**Kata kunci:** *innovative governance, perpaduan peran stakeholders, penggagas inovasi*

---

### Pendahuluan

*Pasca* penerapan sistem desentralisasi yang berdampingan dengan proses globalisasi berdampak pada semakin variatifnya permasalahan daerah, khususnya permasalahan kesehatan sebagai kebutuhan dasar tiap manusia, karena masyarakat yang tak mampu bersaing di era global akan memiliki penghasilan minim sehingga menganggap remeh kesehatan dengan alasan pembiayaan. Tingkat ekonomi rendah pun juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran hidup sehat.

Pemerintah daerah yang mengetahui kelemahan dan kelebihan untuk mengelola permasalahan didaerahnya dituntut seinovatif mungkin untuk menyelesaikan masalah dan

memenuhi kebutuhan masyarakat, daya inovatif harus berdampingan dengan kreatifitas, seperti yang dikatakan Abdullah, "Inovasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan kreatifitas" (2006, h.25). Adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberi kebebasan bagi masing-masing pemerintahan daerah untuk secara kreatif mengelola daerahnya, termasuk dalam urusan pengentasan gizi buruk. Daya inovatif inilah yang wajib dimiliki pemerintah daerah agar mampu memaksimalkan peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kepuasan masyarakat.

Diperlukannya *innovative governance* dalam menjawab permasalahan yang kian variatif masih didampingi dengan sedikit sekali inovasi-inovasi yang muncul di berbagai daerah.

Berdasarkan *global innovation index* (GII) pada 1 Juli 2013, menunjukkan bahwa Indonesia minim inovasi, tingkat inovasi global Indonesia masih tetap tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, meskipun secara peringkat naik ke urutan 85 dibanding tahun sebelumnya pada urutan 100, hal ini jauh dari posisi yang diduduki Singapura (8), Malaysia (32), Thailand (57), Vietnam (76), salah satu penilaian tersebut adalah berdasar kebijakan dan sikap pemerintah masing-masing sehingga mempengaruhi minat inovasi. Tingkat inovasi secara global tersebut dipengaruhi pula dari inovasi-inovasi yang muncul pada pemerintah, yang masih rendah, hingga berdampak pada posisi GII Indonesia yang jauh dari posisi yang ditempati beberapa negara tersebut.

Minimnya *innovative governance* juga dibuktikan dengan kondisi *turbulence*, banyaknya permasalahan daerah maupun pusat yang belum terselesaikan. Hal ini memberikan arti bahwa inovasi tidak lahir begitu saja dan tidaklah suatu hal yang gampang, karena beragam alasan untuk menolak perubahan sebagai imbas dari inovasi, seperti halnya yang dikatakan Kasali (2007, h.272) “Perubahan akan ditumpangi oleh nilai-nilai baru yang sama sekali tidak dikehendaki”, sehingga para aktor yang kontra terhadap perubahan akan tetap berusaha mempertahankan apa yang sudah ada demi kenyamanan dirinya sendiri tanpa berfikir *output* untuk masyarakat. Tidak mudahnya menciptakan dan mengembangkan serta melaksanakan inovasi, maka perlu ada aktor pelopor, *leader*, demikian halnya yang dikatakan Kasali (2007, h.208) “Perubahan berarti memermalukan mereka, karena mereka merupakan bagian dari penyebab yang harus diubah. Itulah sebabnya mengapa dibutuhkan pemimpin”. Pemimpin atau pelopor dapat berasal dari individu maupun kelompok, baik birokrat maupun non birokrat. Salah satunya adalah istri bupati, sebagai pelopor inovasi GENTASIBU.

Dilematisasi kondisi *turbulence* yang sedang terjadi akan berakibat pula pada bidang kesehatan. Salah satu permasalahan utama dalam bidang kesehatan adalah gizi buruk pada balita, yang merupakan *golden age*, di mana kondisi fisik dan otaknya sedang dalam masa pertumbuhan terbaiknya yang akan mempengaruhi kualitas generasi penerus bangsa. Jika tidak mendapat asupan gizi seimbang dan pendidikan dini maka akan menjadi usia rawan dan menjadi generasi yang tidak berdaya saing. Penanganan terhadap gizi buruk kian di-*massive*-kan, PBB menindaklanjutinya dengan *Milenium Development Goals* (MDG's) khususnya poin ke-4, Menurunkan angka kematian anak.

Secara nasional, pada tahun 2012, Indonesia menduduki lima besar negara dengan gizi buruk tinggi, di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 16,18 persen dari total 25.000 balita, dan Nganjuk merupakan penyumbang tertinggi ke-5 di Jawa Timur pada tahun 2009, namun berhasil menurun signifikan pasca diterapkannya Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (GENTASIBU) yang digagas oleh istri bupati Nganjuk yang merupakan individu non birokrat. Kesuksesan GENTASIBU menjadikannya sebagai ikon Nganjuk, dan telah mendapat beberapa pengakuan dan penghargaan, seperti yang dipaparkan salah satu anggota Dewan di DPRD Jatim, “GENTASIBU ini sudah membahana di tingkat Nasional, sepanjang DPRD Jatim melakukan Kunker di Jatim”(DPRD Jatim, Online). Bupati Nganjuk pernah menyampaikan bahwa “program GENTASIBU, tingkat keberhasilannya sudah mencapai 90% lebih artinya benar-benar ada keseriusan” (DPRD Jatim, Online), artinya 10% adalah adanya permasalahan di dalamnya yang menjadikan belum 100% sukses. Salah satu permasalahannya adalah terkait kolaborasi sinergis yang belum dijalin dengan LSM, akademisi dan swasta.

Di dalam keilmuan admistrasi publik, studi *innovative governance* masih minim di tengah beragam masalah yang kian kompleks, dan sulit diatasi tanpa upaya yang bersifat inovatif yang melibatkan banyak aktor, maka diperlukan pengetahuan terhadap proses memunculkan dan mengembangkan gagasan inovatif yang solutif hingga pada tahap penguatan dalam bentuk yang konkrit dan legal, agar dapat dijadikan sebagai percontohan serta penyelesai permasalahan, khususnya permasalahan gizi buruk. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses *innovative governance* melalui gerakan pengentasan gizi buruk serta menganalisis perpaduan penggagas dan *stakeholders* di dalamnya.

## Tinjauan Pustaka

### A. Administrasi Publik

Admistrasi publik sebagai bidang keilmuan peneliti, memiliki beragam pengertian dari berbagai para pakar administrasi publik. Menurut Soesilo Zauhar (Zauhar. 1992, h.27), “Ilmu Pemerintahan itu sama dengan Ilmu Administrasi Negara, karena pada hakekatnya Administrasi Negara adalah Amerikanisasi Ilmu Pemerintahan yang berasal dari Eropa”.

### B. Inovasi

Istilah kata inovasi berasal dari bahasa Inggris, “*innovation*” yang kemudian kata ini

diderivasi dari kata latin *innovare* yang memiliki arti membarui kembali dan *novare* memiliki arti membuat baru. Sedangkan menurut Susanto (2010, h.158), inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru untuk menciptakan produk, proses, dan layanan. Menurut West dan Farr (Ancok, 2012, h.34), inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas). Inovasi Organisasi Sektor Publik (Pemerintah), Inovasi dalam sebuah pemerintahan semakin diperlukan karena adanya perkembangan/kemajuan teknologi (*technical novelty*) yang menjadikan permasalahan kian beragam, perubahan kebutuhan/keinginan atau “selera” masyarakat. Pakar Inovasi Indonesia, Rhenald Khasali dalam bukunya “*Cracking Values*” (Kasali, 2013, h.61) memberikan pemahaman bahwa nilai sektor bisnis memang saatnya diadopsi oleh sektor pemerintah “*corporate values* belakangan bukan hanya mewabah dalam institusi korporasi, melainkan juga dalam dunia pemerintah”.

### C. *Innovative Governance*

Ketika pemerintahan (*Governance*) dikatakan memenuhi kriteria inovasi, memiliki inovasi yang memiliki dampak kebermanfaatannya, maka *governance* dikatakan inovatif. Seperti halnya organisasi yang memiliki inovasi yang bermanfaat maka dikatakan organisasi tersebut inovatif. Inovatif ada sebagai dampak adanya inovasi.

### D. *Triple Helix*

Model *triple helix* memerlukan sinergisitas peran antara akademisi, pemerintah dan swasta (industri). Gagasan utama *triple helix* adalah sinergi kekuatan antara tiga pihak yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedangkan pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif, ini diadopsi dari konsep yang ditawarkan Etzkowitz dan Leydesdorff (Bakrie, Kemenristek. Online).

### E. *Gizi Buruk*

Gizi buruk tidak hanya berpengaruh pada saat terjangkit, namun akan membawa dampak yang dialami cukup lama oleh penderita, hingga

bertambahnya usia sekalipun. Kemungkinan besar periode usia balita lebih rentan dibanding usia lainnya. Gizi buruk adalah kondisi kurang gizi dalam tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama (PERSAGI, 2009, h.75).

### Metode Penelitian

Data-data serta argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan peneliti ingin mengungkap berbagai fakta di lapangan melalui data primer dan sekunder yang ditemukan di lapangan yang nantinya akan dikorelasikan dengan teori yang digunakan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Spradley yaitu meliputi analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun primer.

### Pembahasan

#### 1. *Proses Innovative Governance* melalui *Gerakan Pengentasan Gizi Buruk*

##### a. *Aktor Penggagas*

Penggagas gerakan pengentasan gizi buruk (GENTASIBU) adalah istri bupati Kabupaten Nganjuk, sebagai istri seorang pejabat yang turut serta memiliki otoritas, terutama melalui PKK yang dipimpinya, dan kesempatan ini dimanfaatkan beliau untuk menghasilkan inovasi yang membangun, dan menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Beliau tidak memiliki riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan maupun riwayat organisasi di bidang kesehatan, namun sudah ada dua program bidang kesehatan yang digagas beliau, yaitu GENTASIBU dan GARDARISTI. Penggagas bisa dikatakan sosok yang demokratis, dalam artian mau menerima ide-ide dari SKPD terkait ketika proses pengembangan gagasan saat itu (tahun 2009) dan juga sekaligus manajer yang tegas dan inovatif karena mampu mengkoordinir ego dari masing-masing SKPD, sebelum GENTASIBU masing-masing SKPD berjalan sendiri-sendiri, dalam GENTASIBU semua berjalan bersama dalam satu gerakan tersebut, ini menandakan bahwa istri bupati mampu memberikan kontribusi terhadap pemerintahan suaminya, serta membantu menyelesaikan permasalahan di daerahnya.

Seorang penggagas ide inovatif yang selanjutnya mampu membawa gagasan tersebut menjadi agenda pemerintah untuk menjawab permasalahan di daerah, khususnya dalam bidang kesehatan tidak harus memiliki *background* dari dunia medis, karena selanjutnya dalam proses pengembangan gagasan dapat mengikutsertakan ahli medis untuk memberi masukan terhadap gagasan yang dimunculkan, yang dibutuhkan seorang penggagas ide inovatif adalah komitmen dan konsistensi memperjuangkan gagasan. Ketika komitmen sudah kuat maka akan menuntun langkahnya untuk terus sebisa mungkin memperjuangkan gagasan inovatifnya mampu menjadi agenda pemerintah secara legal dan sampai pada tahap implementasi serta mampu menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan dengan gagasan inovatif. Begitu pula dengan adanya konsistensi, ketika penggagas konsisten maka dalam proses pengembangannya jika terjadi hambatan maka akan berusaha untuk tetap *stronge* menghadapi berbagai hambatan proses pengembangan gagasan sampai bisa masuk menjadi agenda pemerintah.

Hal tersebut menandakan bahwa penggagas adalah seorang yang *responsive* dan peduli terhadap permasalahan di sekitarnya serta secara inisiatif dan kreatif mengembangkan gagasan tersebut, didampingi dengan sikap demokratis turut serta mengajak para ahli di bidang yang berkaitan untuk turut berkontribusi memberi masukan terhadap gagasan inovatif yang diusung sehingga mampu memaksimalkan gagasan. Beberapa hal yang sudah dilakukan penggagas juga menandakan bahwa penggagas, memiliki *mindset* sebagai istri seorang pelayan rakyat, maka orientasi berfikirnya adalah demi kesejahteraan rakyatnya. *Mindset* yang dimiliki ini akan menjadikannya seorang yang produktif berkontribusi pada daerahnya. .

Satu gagasan inovatif dari seorang istri bupati melalui GENTASIBU ini sudah membawa beragam kebermanfaatan, menurunkan angka balita gizi buruk, menjadi percontohan bagi kabupaten lain, dan diadopsi oleh DPRD Provinsi Jatim untuk membuat peraturan daerah tentang gizi (merupakan yang pertama di Indonesia). Jika banyak bermunculan istri-istri bupati yang inovatif dan ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan di daerah maka permasalahan-permasalahan di daerah akan terkikis, berkurang secara bertahap. Maka seorang istri bupati wajib mendukung pemerintahan suaminya, seorang istri bupati yang mendukung pemerintahan suaminya ditandai dengan:

a. Inovatif

Untuk menjadi inovatif didahului dengan adanya responsibilitas terhadap beragam masalah dan tuntutan masyarakat, yang kemudian didukung oleh kreatifitas memunculkan gagasan yang selanjutnya didampingi dengan prinsip, komitmen dan ketegasan untuk mengembangkan dan melaksanakan gagasan yang sudah dimunculkan.

b. Produktif

Seorang istri bupati yang produktif, akan lebih banyak turut serta menyelesaikan permasalahan di daerah daripada sekedar memanfaatkan fasilitas negara, lebih banyak menghasilkan kebermanfaatan daripada melakukan pemborosan.

c. *Mindset* sebagai suami dari pelayan rakyat

Seorang istri bupati yang memiliki pola pikir (*mindset*) sebagai suami dari pelayan rakyat maka ia akan turut serta berupaya mengurangi permasalahan di daerah.

**b. Kemunculan dan Tindakan Lanjutan Gagasan Inovasi GENTASIBU serta Pelaksanaanya**

Kemunculan gagasan inovatif GENTASIBU diawali ketika inovator yang merupakan istri bupati sebagai penggagas mengikuti acara pertemuan istri bupati Se-Indonesia di Jakarta, di sana Ibu Ani Yudhoyono selaku pemateri memberikan pertanyaan tentang jumlah gizi buruk di masing-masing daerah, saat itu beliau tidak tahu jumlahnya berapa, ketika kembali ke Nganjuk baru ditanyakan kepada kepala Dinkes, ternyata jumlah gizi buruk di Nganjuk, jauh lebih tinggi dari pada daerah lain. Berangkat dari hal itu, beliau memiliki gagasan bagaimana seharusnya gizi buruk bisa diantisipasi, yaitu dengan suatu gerakan. Setelah itu dilakukanlah koordinasi beberapa kali untuk mengembangkan gagasannya. Di awal koordinasi masih terlihat ego masing-masing satuan kerja terkait, namun akhirnya terkikis hingga berhasil disahkan melalui SK Bupati tentang pembentukan tim gerakan pengentasan gizi buruk (GENTASIBU) yang memberi kekuatan hukum bagi GENTASIBU dan akan mengarahkan jalannya GENTASIBU secara *suistibnable*. Menurut Susanto (2010, h.158), inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru untuk menciptakan produk, proses, dan layanan. Begitupula dengan GENTASIBU, yang berawal dari ide baru untuk menciptakan proses baru dalam penanganan gizi buruk. Serta sesuai dengan yang disampaikan West dan Farr (Ancok, 2012, h.34), inovasi adalah pengenalan dan

penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

Penggagas inovasi yang demikian adalah seorang yang memiliki daya tanggap yang selanjutnya direspon dengan baik oleh Dinas Kesehatan yang merupakan Dinas pertama yang dirangkul, hal ini dapat diartikan bahwa Dinas Kesehatan sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan salah satu kebutuhan pokok, yaitu kesehatan. Tidak hanya penyediaan salah satu kebutuhan pokok, namun juga telah mengadopsi “*corporate values*” yang memang suatu kebutuhan bagi Pemerintah untuk melakukannya, sesuai dengan yang disampaikan Khasali (2013, h.61) “*corporate values* belakangan bukan hanya mewabah dalam institusi korporasi, melainkan juga dalam dunia Pemerintah”, tanpa inovasi, permasalahan gizi buruk di Kabupaten Nganjuk tidak akan terselesaikan dengan baik.

Kunci sukses inovasi GENTASIBU sebelum dilegalkan (ketika masih pengembangan gagasan) adalah kemampuan penggagas yang responsif menangkap permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan, yaitu tingginya balita gizi buruk. Adanya masalah tersebut menjadi pendorong penggagas untuk mencari solusi yang inovatif. Meskipun sesungguhnya terletak pada semua aktor, namun yang utama adalah penggagas gagasan inovatif tentang GENTASIBU, yaitu inovator atau penggagas yang dari awal sudah berkomitmen untuk turut serta mendukung suami sebagai Bupati Kabupaten Nganjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya, utamanya dalam pengentasan balita gizi buruk yang mana sebelum periode kepemimpinan suaminya masih sangat tinggi penderitanya. inovator pun secara rutin turut serta terjun langsung dalam koordinasi GENTASIBU pada saat sudah masuk ranah implementasi, misalnya pada saat evaluasi selalu menyempatkan untuk hadir. Pasca dilegalkan, kunci sukses selanjutnya ada pada kader yang secara sukarela ikhlas tanpa pamrih untuk secara sadar diri turut berupaya menurunkan angka gizi buruk, seolah-olah sudah menjadi prinsip, sebisa mungkin balita gizi buruk harus disembuhkan.

## 2. Perpaduan Peran Stakeholders

Peran dari masing-masing aktor secara normatif memang harus serasi. Peran ketika pengembangan, masing-masing *stakeholders* yang mengikuti koordinasi masih memperlihatkan ego-nya, namun berhasil disatukan oleh aktor penggagas. Pada tahap implementasi

(persiapan, pelaksanaan dan evaluasi) pun demikian menunjukkan keserasian, masing-masing *stakeholders* terkait dominan dan tidak dominan peranya sangat tergantung waktu, dalam artian dalam waktu dan kondisi tertentu seorang atau beberapa aktor bisa mendominasi dan bisa tidak mendominasi. Dalam perjalanan implementasi sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 belum ada kerjasama dengan LSM serta akademisi. Sedangkan pada buku pedoman jelas tercantum mengharuskan adanya evaluasi yang juga diikuti oleh LSM sebagai pihak yang independen.

Ditinjau dari permodelan *triple helix*, dalam GENTASIBU, belum adanya peran dari akademisi untuk mengembangkan gagasan yang sudah ada ataupun untuk ikut serta mengevaluasi setiap akhir periode semesternya. Selanjutnya kalangan bisnis berperan dalam penyediaan asupan bubur untuk balita GENTASIBU, selain dari yang sudah disuplai oleh Kemenkes RI. Pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif. Pemerintah sebagai administrator selayaknya membuat regulasi yang mampu menjaga kestabilan hubungan keduanya. Begitu pula ketika GENTASIBU mulai legal pada tahun 2009, melalui Surat Keputusan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi tim GENTASIBU, serta sudah ada buku pedoman pelaksanaan, maka keputusan legal tersebut sudah dilaksanakan oleh aktor terkait, dan sesuai dengan deskripsi peran yang sudah tertuang dalam SK tersebut, hanya saja terkait keseriusan dengan aturan yang sudah dibuat, kurang maksimal, dibuktikan oleh belum adanya kerjasama dengan LSM, padahal dalam buku pedoman GENTASIBU disebutkan saat evaluasi, yang mengevaluasi adalah termasuk LSM supaya hasil evaluasi lebih *objective*, dan ini yang belum ada sejak tahun 2009, sampai saat ini evaluasi hanya searah oleh dinas kesehatan daerah, kerjasama dengan kalangan akademisi pun juga belum terjalin.

## Kesimpulan

GENTASIBU sebagai perwujudan proses *Innovative Governance* tidak akan bisa tercipta bahkan tidak akan bisa sukses menurunkan angka balita gizi buruk jika tidak memiliki aktor penggagas yang berkomitmen, tegas dan konsisten dengan gagasan inovatif yang ingin dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan. Kemunculan gagasan inovatif yang didampingi dengan tindakan lanjutan yang tepat juga memengaruhi pada tingkat keberhasilan GENTASIBU dalam pencapaian tujuan utamanya, yaitu menurunkan angka balita gizi buruk.

Peran aktor penggagas yang berpadu serasi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam penanganan gizi buruk menjadikan proses pengembangan gagasan berhasil melegalkan gagasan tentang gerakan pengentasan gizi buruk sampai diimplementasikan dengan dampak yang

positif yang meningkat tiap tahunnya. Tanpa perpaduan serasi *stakeholders*, maka *innovative governance* tidak akan tercipta, dikarenakan *innovative governance* membutuhkan keserasian peran antar aktor yang terlibat.

---

#### Daftar Pustaka

- Ancok, Djamaludin. (2012) **Kepemimpinan dan Inovasi**. Jakarta, Erlangga.
- Bakrie A. (2013) **Triple Helix dan Percepatan Inovasi**. [Internet], Kemenristek. Available from: <[www.ristek.go.id/triplehelix.php](http://www.ristek.go.id/triplehelix.php)> [Accessed 23rd June 2013].
- DPRD Jatim. (2013) **GENTASIBU Mendapat Perhatian**. [Internet], DPRD Jatim. Available from: <<http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/567/-reses-dua-giliran-program-GENTASIBU-dapat-perhatian-#sthash.r6XWIS7D.dpuf>> [Accessed 28th October 2013].
- Kasali, Rhenald. (2012) **Cracking Values**. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- \_\_\_\_\_. (2007) **CHANGE!**. Jakarta, Ikrar Mandiriabadi.
- \_\_\_\_\_. (2007) **Recode DNA**. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). (2009) **Kamus Gizi: Pelengkap Kesehatan Keluarga**. Jakarta, Kompas.
- Susanto. (2010) **60 Management Gems**. Jakarta, Kompas.
- Zauhar, Soesilo. (1992) **Pengantar Ilmu Administrasi Negara**. Malang, PPIIS Unibraw.